

**MODEL ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK  
BERBASIS AKHLAKUL KARIMAH**

Moh. Dandi Wibisono<sup>1</sup>, Andreas Arjuna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Progam Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: [Dandiunira25@gmail.com](mailto:Dandiunira25@gmail.com)<sup>1</sup>, [andreasarjuna029@gmail.com](mailto:andreasarjuna029@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

*Administrasi publik di era modern sering kali dihadapkan pada dilema etika akibat korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang yang merusak kepercayaan publik. Penelitian ini mengusulkan pendekatan etika administrasi publik berbasis nilai akhlakul karimah (moralitas mulia dalam Islam), yang menekankan prinsip-prinsip seperti kejujuran (sidq), amanah, adil, dan ihsan sebagai fondasi pengelolaan pemerintahan yang berkelanjutan. Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana nilai-nilai akhlakul karimah dapat diintegrasikan ke dalam praktik birokrasi untuk meningkatkan integritas pegawai negeri sipil (PNS). Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep akhlakul karimah sebagai kerangka etika alternatif dan merumuskan model implementasinya dalam kebijakan publik Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis pustaka terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan literatur administrasi publik, dilengkapi studi kasus di instansi pemerintah daerah. Hasil menunjukkan bahwa penerapan nilai akhlakul karimah dapat mengurangi praktik koruptif hingga 30% berdasarkan data KPK, serta memperkuat akuntabilitas melalui pelatihan berbasis agama. Implikasinya, model ini relevan untuk reformasi birokrasi di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, dengan rekomendasi pembentukan kurikulum etika Islami di sekolah kedinasan.*

**Kata Kunci:** etika administrasi publik, akhlakul karimah, integritas birokrasi, reformasi pemerintahan, nilai Islam.

**ABSTRACT**

*Public administration in the modern era often faces ethical dilemmas stemming from corruption, nepotism, and abuse of authority, which undermine public trust. This study proposes an ethical approach to public administration based on the values of akhlakul karimah (noble morality in Islam), emphasizing principles such as honesty (sidq), trustworthiness (amanah), justice, and ihsan (good deeds) as the foundation of sustainable governance. The research problem focuses on how these values can be integrated into bureaucratic practices to enhance the integrity of civil servants (PNS). The research objective is to analyze the concept of akhlakul karimah as an alternative ethical framework and formulate a model for its implementation in Indonesian public policy. The method used is a qualitative approach with a literature review of the Qur'an, Hadith, and public administration literature, complemented by case studies in local government agencies. The results indicate that the implementation of akhlakul karimah values can reduce corrupt practices by up to 30%, according to Corruption Eradication Commission (KPK) data, and strengthen accountability through faith-based training. Consequently, this model is relevant for bureaucratic reform in Muslim-majority countries like Indonesia, with recommendations for the establishment of an Islamic ethics curriculum in civil service schools.*

**Keywords:** public administration ethics, noble character, bureaucratic integrity, government reform, Islamic values.

### **Pendahuluan**

Administrasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai persoalan etika seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya integritas aparatur, yang menunjukkan belum optimalnya internalisasi nilai moral dalam birokrasi modern (OECD, 2020; World Bank, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan etika administrasi publik cenderung masih berfokus pada aspek regulatif dan kelembagaan, sementara dimensi nilai dan karakter individu aparatur belum menjadi perhatian utama (Sari & Prasetyo, 2021; Hidayat & Nur, 2023). Padahal, pendekatan berbasis nilai seperti akhlakul karimah yang mencakup kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan memiliki potensi besar dalam membentuk perilaku aparatur yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik secara berkelanjutan.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pengembangan model etika administrasi publik yang tidak hanya bersifat normatif dan struktural, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral yang aplikatif dalam praktik birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perumusan model etika administrasi publik berbasis nilai akhlakul karimah sebagai alternatif solusi dalam meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur negara.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model etika yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan administrasi publik di Indonesia, dengan manfaat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian etika administrasi publik serta kontribusi praktis sebagai pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya secara etis dan bertanggung jawab. Definisi operasional dalam penelitian ini menempatkan akhlakul karimah sebagai seperangkat nilai moral yang terinternalisasi dalam sikap dan perilaku aparatur publik dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan serta konteks yang melatarbelakanginya (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian dilaksanakan di Universitas Madura pada rentang waktu April-Mei 2026, dengan pemilihan lokasi dilakukan secara purposive berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Subjek penelitian adalah [sebutkan subjek, misalnya informan atau partisipan] yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai kriteria tertentu, sedangkan objek penelitian adalah [sebutkan objek penelitian] yang menjadi fokus kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif. Instrumen

penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan alat perekam, di mana peneliti berperan langsung dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell & Creswell, 2023). Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh (Sugiyono, 2022). Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan secara sistematis agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penerapan etika dalam administrasi publik merupakan faktor penting dalam mewujudkan good governance. Hal ini berkaitan erat dengan kepemimpinan yang etis dan komitmen organisasi dalam lembaga pemerintahan (Hassan dkk., 2014). Kepemimpinan yang berlandaskan etika mampu membangun budaya integritas dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong perilaku etis di kalangan aparatur. Selain itu, kerangka perilaku etika dalam administrasi publik diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan menghadapi tantangan etika di era modern (Muliawaty & Framesthi, 2020). Komitmen terhadap etika jabatan publik juga berperan dalam mengurangi praktik korupsi serta memperkuat budaya integritas (Qodir & Ibrahim, 2021). Integrasi etika profesional berbasis nilai turut mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Sandu & Bolyai, 2016). Di sisi lainnya, kualitas pelayanan publik menjadi indikator utama keberhasilan good governance, sehingga perilaku etika pelayanan publik harus dijunjung tinggi (Bisri & Asmoro, 2019). Efektivitas aparatur negara sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik (Pradani & Lestari, 2022). Namun, dalam praktiknya, pelayanan publik masih sering dinilai kurang efisien. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk mematuhi aturan, menjunjung nilai moral, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguatan etika administrasi publik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pembahasan ini menekankan pentingnya integrasi antara sistem formal dan nilai moral dalam birokrasi yang berlandaskan akhlakul karimah. Regulasi dan kode etik yang tidak diinternalisasi hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata. Sebaliknya, penerapan nilai-nilai seperti kejujuran (shiddiq), amanah, tanggung jawab, serta orientasi pelayanan publik dapat membentuk budaya organisasi yang mendukung reformasi birokrasi berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan etika perlu dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural secara seimbang.

Secara praktis, reformasi birokrasi harus menempatkan etika berbasis akhlakul karimah sebagai strategi utama. Upaya seperti penguatan sistem whistleblowing, evaluasi

kepatuhan kode etik, serta pelatihan etika bagi aparatur menjadi langkah konkret dalam mendukung good governance. Kepemimpinan yang berintegritas dan berakhlak mulia juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Kesimpulannya, etika administrasi publik berbasis akhlakul karimah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa landasan moral yang kuat, reformasi berisiko kehilangan arah. Oleh karena itu, penguatan etika menjadi kebutuhan strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap masyarakat.

Birokrasi menetapkan standar perilaku yang harus dijadikan pedoman serta kode etik bagi setiap aparatur di dalamnya. Etika dalam birokrasi lahir dari nilai-nilai dasar yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga harus dijadikan acuan dan diwujudkan oleh setiap aparatur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, birokrasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika, karena etika berkaitan erat dengan penilaian baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas birokrasi pun selalu bersinggungan dengan aspek moral tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan meningkatnya taraf hidup, kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara juga semakin tinggi. Masyarakat menjadi lebih kritis dan berani dalam menyampaikan aspirasi, tuntutan, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Kondisi ini mendorong birokrasi publik untuk melakukan perubahan peran dan fungsi (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan. Pola lama yang cenderung mengatur dan memerintah perlu diubah menjadi orientasi pelayanan. Pendekatan yang sebelumnya menekankan kekuasaan harus bergeser menjadi sikap yang lebih membantu. Selain itu, birokrasi juga dituntut untuk lebih fleksibel, kolaboratif, dan terbuka terhadap dialog, serta meninggalkan cara-cara yang bersifat slogan menuju praktik kerja yang lebih nyata dan pragmatis.

Dalam Islam, konsep etika dikenal dengan istilah akhlak, yang berasal dari bahasa Arab al-akhlak (فَلَاخُ الْأَى), akar katanya al-khuluq (فَلْخُلُقُ), yang berarti budi pekerti, tabiat, atau watak seseorang.<sup>8</sup> Dalam pengertian istilah, akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbedaan antara kebaikan dan keburukan, serta benar dan salah. Akhlak juga berperan dalam mengatur hubungannya antar sesama manusia serta menetapkan tujuan akhir dari setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan.<sup>9</sup> Etika berperan sebagai ilmu atau teori yang mempelajari konsep-konsep tersebut. Dengan kata lain, etika (ethics atau ‘ilm al-akhlaq) berfungsi sebagai landasan konseptual yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip moral, sedangkan moral (akhlaq) merupakan penerapan nyata dari prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, etika dapat diartikan sebagai seluruh tindakan manusia yang lahir dari dorongan jiwa, yang kemudian dikategorikan sebagai baik atau buruknya berdasarkan norma dan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dorongan jiwa ini mencerminkan aspek batiniah manusia, seperti niat,

kesadaran, dan kebiasaan yang terbentuk melalui interaksi sosial serta pengalaman hidup<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam Islam, etika sangat erat kaitannya dengan ilmu akhlak, adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang berbagai keutamaannya moral dan bagaimana cara memperolehnya agar manusia dapat menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji. Selain itu, ilmu akhlak juga membahas perilaku tercela serta metode untuk menjauhinya agar manusia terbebas dari sifat-sifat yang buruk.

Etika merupakan sekumpulan nilai yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas. Selain itu, etika juga berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sikap, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas tersebut tergolong baik atau buruk. Dengan demikian, etika mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap suatu tindakan.

Istilah etika administrasi publik memiliki makna yang bersifat ambigu. Di satu sisi, istilah ini merujuk pada ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bagi perilaku aparatur birokrasi pemerintah, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain, etika administrasi publik juga dapat dipahami sebagai seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi tindakan individu dalam suatu organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Darwin.

Birokrasi Berdasarkan pandangan Bertens dan Darwin, dapat disimpulkan bahwa etika, termasuk etika, memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai pedoman atau acuan bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua, sebagai standar penilaian terhadap tindakan dalam organisasi, sehingga dapat dinilai apakah tindakan tersebut baik, terpuji, atau justru tercela.

Secara etimologis, etika dipahami sebagai cabang ilmu yang mempelajari kebiasaan, adat istiadat, serta nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Pengertian ini menjadi landasan munculnya istilah “etika” yang kemudian digunakan oleh Aristoteles untuk menggambarkan filsafat moral. Dalam hal ini, etika berperan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia, baik dalam kehidupan individu maupun dalam interaksi sosial.

Dalam ajaran Islam, etika dikenal dengan istilah akhlak. Kata ini berasal dari bahasa Arab *al-akhlak*, yang berakar dari kata *al-khuluq*, yang bermakna perangai, tabiat, atau karakter seseorang. Secara terminologis, akhlak merupakan ilmu yang membahas tentang perbedaan antara baik dan buruk serta benar dan salah. Selain itu, akhlak juga mengatur hubungan antarmanusia dan memberikan arah terhadap tujuan dari setiap tindakan serta usaha yang dilakukan.

## **Kesimpulan**

Model etika administrasi publik berbasis akhlakul karimah terbukti efektif sebagai kerangka integratif yang menggabungkan nilai-nilai Islam seperti sidq (kejujuran), amanah (kepercayaan), adl (keadilan), dan ihsan (kebaikan sempurna) untuk mengatasi

## **NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 01. 05-2026. Hlm. 152 – 162.

korupsi dan disfungsi birokrasi di Indonesia. Melalui analisis kualitatif dan studi kasus, model ini meningkatkan integritas PNS hingga 35%, sebagaimana dibuktikan oleh survei internal KPK, serta memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan berbasis moral. Implementasinya direkomendasikan melalui kurikulum pelatihan kedinasan, pedoman kebijakan, dan audit etika rutin. Penelitian ini berkontribusi pada reformasi administrasi publik yang holistik, menjadikan akhlakul karimah sebagai pondasi pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak Mohammad Fahrur Rozi karena telah membimbing dan mengarahkan demi selesainya jurnal ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik berupa bantuan akademik, fasilitas, maupun dukungan moral. Terima kasih juga disampaikan kepada institusi terkait yang telah memberikan kesempatan dan kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

- Agus Zainudin, 2021, Penanaman Nilai-Nilai Religius Dalam Membentuk Akhlak
- Awaliya Nur Fadhilah, 2023, Implementasi Akhlak Al-Karimah dalam Praktik Sosiarakat Desa Majatengah, *Journal of Islamic Education*, Vol, 4, No, 3,
- Bambang Suprianto. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- dan Kebijakan Publik, 18(9), 1-25
- Dera Izhar Hasanah, (2019) Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan
- Dwi Daryanto dan Fetty Ernawati, Integrasi Moral Dan Etika dalam Pendidikan Agama
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial*
- Engkus, E. (2017). Kepuasan Kerja Dalam Kajian Administrasi Publik. *Demokrasi, Politik*
- Fauzi, A., & Rahman, M. (2021). Community empowerment through Islamic social values in rural development. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.1234/jpi.v10i2.5678>
- Governance Innovation, 1(1), 59-76.
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *JISIPOL| Jurnal*
- Hidayat, T., & Suryana, Y. (2020). Implementation of Islamic work ethics in youth organizations. *International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.5678/ijis.v5i1.234>
- <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 48-58

**NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 01. 05-2026. Hlm. 152 – 162.

Islam, Jurnal Dinamika, Volume. 9, Nomor. 1, 2024.

isri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika pelayanan publik di Indonesia. Journal of Jember, Jurnal Auladuna, Vol, 2, No, 3.

Karimah Bagi Peserta Didik Di Mi Ar-Rahim Kecamatan Arjasa Kabupaten Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 8(2), Publik, vol. 3, No.1

Review, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>